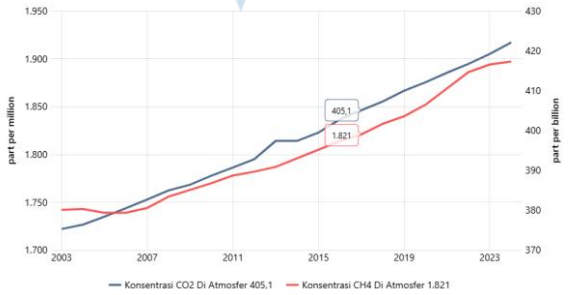
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik bisnis hijau menjadi pusat perhatian yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan (Wilana dkk., 2024). Upaya ini tidak hanya berlaku pada sektor-sektor yang relatif mudah beradaptasi, tetapi juga pada sektor yang memiliki tantangan besar seperti energi dan manufaktur. Di Indonesia, beberapa perusahaan telah mulai menerapkan praktik bisnis hijau sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan. Penerapan praktik ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan tata kelola perusahaan. Khususnya bagi sektor energi yang memiliki risiko lingkungan tinggi, perusahaan dituntut untuk menunjukkan secara terbuka apa saja kegiatan keberlanjutan yang telah dilakukan serta sejauh mana kegiatan tersebut mampu meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Meskipun sektor energi sering dianggap sebagai penyumbang dampak lingkungan terbesar, kebutuhan untuk menerapkan praktik bisnis hijau semakin mendesak sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengomunikasikan seluruh aktivitas keberlanjutan melalui pengungkapan yang transparan dan berkualitas. Pengungkapan keberlanjutan ini menjadi aktivitas penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai komitmen, kinerja, dan tanggung jawab perusahaan terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).



Gambar 1.1. Grafik Peningkatan Gas Rumah Kaca

Sumber : (Databoks, 2024)

Berdasarkan grafik tersebut, emisi karbon menunjukkan peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Dampak dari emisi karbon ini diturunkan oleh berbagai pihak, salah satunya perusahaan sebagai penyumbang polusi dan berdampak ke masyarakat luas. Transformasi bisnis menjadi keberlanjutan bukan menjadi suatu pilihan, tetapi suatu keharusan yang dilaksanakan oleh perusahaan (Agustina & Pradesa, 2024). Dampak yang belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat berkaitan dengan lingkungan sudah menjadi perhatian utama agar hidup berkelanjutan di bumi. Hal ini dibuktikan oleh berbagai konferensi yang membahas lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut. Salah satu konferensi yang memberikan dampak dalam kebijakan dunia, yaitu *UN Climate Change Conference* (COP21) Paris.

Kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan dan menjadi standar akuntansi internasional adalah IFRS S1 dan IFRS S2 yang dibentuk pada 26 Juni 2023. Standar ini bertujuan untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan menilai sejauh mana suatu entitas terpapar serta bagaimana entitas tersebut mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta membantu mereka dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas tersebut. Standar ini berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan untuk mengurangi bias dalam tujuan. Adaptasi IFRS S1 dan IFRS S2 yang akan digunakan di Indonesia adalah PSPK 1 dan PSPK 2 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Dengan berlakunya PSPK 1 dan PSPK 2, perusahaan sudah berkewajiban untuk melaporkan informasi keberlanjutannya kepada publik. Standar utamanya untuk pengungkapan keberlanjutan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) di mana juga akan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kelengkapan informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan publik. Pengungkapan keberlanjutan ini dilakukan melalui laporan keberlanjutan untuk dikomunikasikan dengan publik terutama perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia.

Pengungkapan keberlanjutan menjadi salah satu aksi yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan kontribusi sosial kepada masyarakat. Laporan keberlanjutan merupakan sarana untuk mengungkapkan informasi kinerja

keuangan, sosial, dan lingkungan kepada berbagai pemangku kepentingan (Tumwebaze dkk., 2022). Melalui pengungkapan ini, perusahaan tidak hanya mempromosikan inisiatif berkelanjutan sebagai bagian dari reputasi dan citra positif, tetapi juga memberikan transparansi yang diperlukan agar para pemangku kepentingan dapat menilai komitmen keberlanjutan secara objektif. Namun, kekurangan pengungkapan *Environment, Social, and Governance* (ESG) oleh perusahaan dapat menyebabkan investor menanamkan modal pada perusahaan yang mencemari lingkungan atau merugikan karyawan melalui praktik yang tidak adil (Mohammad & Wasiuzzaman, 2021). Oleh karena itu, kualitas pengungkapan keberlanjutan menjadi krusial untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar kredibel, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

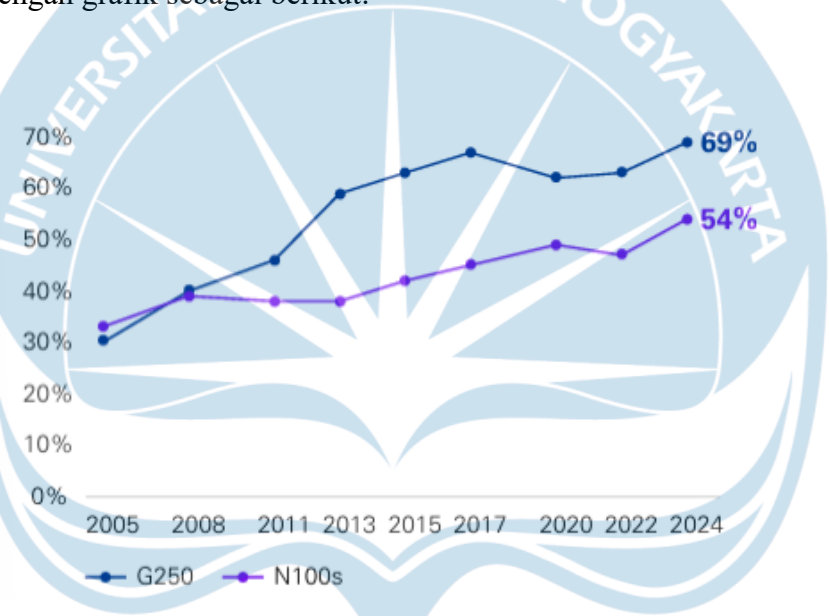
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boiral & Henri (2017), laporan keberlanjutan berjalan lebih baik di negara maju, sedangkan negara berkembang cenderung mengutamakan pengaruh terhadap profitabilitas, luas dari pengungkapan, dan perbandingan pengungkapan internasional. Hal ini terjadi akibat pengungkapan keberlanjutan masih dilakukan secara *voluntary* di Indonesia sehingga kualitas informasi yang disampaikan hanya disesuaikan dengan aturan yang berlaku (Astuti & Putri, 2019). Selain itu, pernyataan ini juga disebutkan dalam *Roadmap of Indonesian Sustainability Disclosure Standards* yang dirilis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa pengungkapan informasi terkait iklim (*climate-related information*) akan menjadi fokus utama, sedangkan informasi keberlanjutan di luar aspek iklim masih bersifat sukarela pada tahap awal. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari POJK 51 yang mewajibkan bagi perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Integritas dari laporan keberlanjutan dapat dipertanyakan apabila belum diaudit oleh pihak independen yang kompeten. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas pengungkapan keberlanjutan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Penelitian yang membahas tentang kualitas informasi dari pelaporan keberlanjutan masih terbatas (Mion & Adaui, 2020; Moses dkk., 2019).

Pelaporan keberlanjutan dan penetapan target karbon sudah menjadi bagian dari operasi bisnis (KPMG, 2024). Pernyataan dari KPMG itu juga diperjelas bahwa laporan keberlanjutan dan target karbon sudah digunakan oleh 96% kelompok perusahaan G250 dan 80% kelompok perusahaan N100 secara global. Meskipun perusahaan perlu memenuhi ekspektasi pemegang saham dalam meningkatkan laba, perusahaan juga memiliki tanggung jawab atas pemangku kepentingan lainnya, seperti pemasok, pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemerintah, dan masyarakat (Ganesan dkk., 2017). Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* dalam penerapannya bagi perusahaan adalah melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan mulai diberlakukan untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan sejak tahun 2021 yang mendukung praktik berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki target yang bernama *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, Indonesia memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengelolaan dari perusahaan sebagai penyumbang emisi itu tersendiri.

Pengungkapan keberlanjutan harus dibuat berdasarkan berbagai standar yang ada, seperti GRI, *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), *Carbon Disclosure Project* (CDP). Hal ini merujuk pada ketimpangan, yaitu kesulitan untuk memilih standar di mana setiap standar tersebut mengklaim sebagai solusi terbaik dalam pengungkapan keberlanjutan perusahaan (Gkotsi & Pitkänen, 2023). Dengan adanya perbedaan kebijakan dari adopsi standar tersebut, hal ini menghasilkan kurangnya konsensus di antara manajemen yang menyusun laporan keberlanjutan dengan investor yang memahami informasi. Penelitian Gkotsi & Pitkänen (2023) juga menyebutkan bahwa ada perbedaan makna dari konsep yang membingungkan antara "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" (CSR), "Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola" (ESG), dan "Pelaporan Terintegrasi" (*Intergrated Reporting*), dan lainnya. Hal ini juga menyebabkan kedua belah pihak tidak menemukan titik temu antara informasi yang diberikan dan diterima atau kesulitan dalam mengoperasionalkan, mengukur, dan mengomunikasikan tujuan serta target dalam keberlanjutan perusahaan. Tantangan terakhir yang disebutkan dalam penelitian Gkotsi & Pitkänen (2023) adalah pengungkapan keberlanjutan dilakukan hanya untuk

meningkatkan citra perusahaan tanpa kepedulian para pemangku kepentingan sehingga gagal mengungkapkan isu material yang menjadi perhatian pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan peningkatan kualitas informasi yang disampaikan ke pemangku kepentingan (Odriozola, M. D., & Baraibar-Diez, 2017).

Untuk mengukur kualitas informasi dan mengetahui keandalan data laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menggunakan jasa *assurance* keberlanjutan di mana sudah digunakan secara berkelanjutan dari 2005 hingga 2024 oleh G250 dan N100 dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 1.2 Survei Penerbitan Laporan Keberlanjutan

Sumber : *Survey of Sustainable Reporting* 2024 dari KPMG

Grafik tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar di dunia sudah memulai untuk menerbitkan laporan *assurance* keberlanjutan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang akurat, andal, dan memenuhi standar tertentu. Perusahaan G250 dan N100 mengalami tren kenaikan yang menunjukkan perusahaan lebih mengetahui perlu adanya laporan *assurance* keberlanjutan. Keputusan untuk dilakukan adanya *assurance* dalam laporan keberlanjutan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan untuk memberi manfaat kepada perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan transparansi terhadap informasi kepada pemangku kepentingan termasuk informasi keberlanjutan yang diungkapkan secara kredibel di laporan keberlanjutan (Odriozola, M. D., & Baraibar-Diez, 2017). Hal ini terjadi akibat permintaan informasi yang meningkat oleh para pemangku kepentingan di beberapa tahun terakhir. Cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan transparansi adalah dengan mempublikasikan, menjelaskan informasi melalui laporan keberlanjutan, dan membangun tata kelola yang baik (Ganesan dkk., 2017). Penerapan kualitas pengungkapan keberlanjutan dapat dinilai dari seberapa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan publik berdasarkan standar yang berlaku, yaitu GRI. GRI mengadopsi pendekatan *multi-stakeholder* dengan konsep *impact materiality* yang sejalan dengan teori *stakeholder*, di mana perusahaan harus bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelaporan keberlanjutan merupakan mekanisme untuk mempublikasikan informasi tersebut sebagai bagian dari tata kelola yang baik (Ganesan dkk., 2017; Vola dkk., 2025).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan kontribusi langsung terhadap kejelasan dan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Keempat prinsip ini merujuk pada praktik tata kelola yang direkomendasikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Hal ini akan memastikan bahwa setiap informasi keberlanjutan yang dilaporkan akurat, berbasis bukti, dan bebas dari manipulasi sehingga meningkatkan kredibilitas laporan melalui dewan komisaris dan komite audit. Proses pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat dewan membuat perusahaan mampu mengidentifikasi isu material, menetapkan target yang relevan, serta menyusun strategi keberlanjutan yang selaras dengan arah bisnis. Hal ini mendorong pengungkapan yang lebih terstruktur, konsisten, dan informatif. Praktik GCG yang baik juga memperkuat kepatuhan terhadap standar pengungkapan keberlanjutan seperti GRI atau IFRS S1/S2 serta meminimalkan konflik antar unit dalam penyediaan data, sehingga laporan keberlanjutan menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh, meningkatnya

efisiensi operasional dan pengendalian risiko membuat perusahaan mampu mengintegrasikan kinerja finansial dan non finansial secara lebih transparan. Dengan demikian, semakin baik tata kelola perusahaan dijalankan, semakin mampu perusahaan menghasilkan pengungkapan keberlanjutan yang jelas, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Fokus pengendalian informasi yang diberikan dalam laporan keberlanjutan menjadi penting akibat informasi yang diberikan sering tidak berdasarkan bukti atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Salah satu kasus penipuan informasi keberlanjutan atau disebut *greenwashing* yang terjadi pada perusahaan di sektor dengan penghasil emisi tertinggi, yaitu sektor energi terjadi pada PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Penipuan ini dijalankan pada salah satu proyek perusahaan yang bernama proyek *smelter* aluminium menggunakan pembangkit listrik Kalimantan Utara. Menurut berita yang beredar, pembangkit listrik yang digunakan masih menggunakan batu bara sehingga aktivis lingkungan mengkritik proyek tersebut. Berdasarkan data *Global Carbon Atlas*, batu bara merupakan produk yang menghasilkan emisi tertinggi sekitar 15.401 MtCO2 pada tahun 2023.

Keandalan informasi dalam laporan keberlanjutan semakin dipertanyakan karena masih banyak perusahaan yang memanfaatkan pengungkapan keberlanjutan sebagai alat peningkatan citra, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Fenomena *greenwashing* yang terjadi pada sejumlah perusahaan energi menunjukkan bahwa tidak semua informasi yang disampaikan mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. Pada saat yang sama, isu keberlanjutan menjadi aspek yang semakin diperhatikan oleh investor dan lembaga pembiayaan sehingga informasi yang tidak andal berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan dan menimbulkan kerugian bagi investor. Urgensi ini semakin kuat dengan diberlakukannya standar pelaporan global seperti IFRS S1 dan S2 serta meningkatnya tuntutan transparansi di sektor energi yang merupakan penyumbang emisi terbesar. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor tata kelola apa yang mampu meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Penelitian ini dibatasi hanya pada konteks Indonesia dan tidak melakukan perbandingan dengan negara lain agar analisis lebih

fokus pada karakteristik regulasi, praktik pasar, serta struktur tata kelola perusahaan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat topik "Pengaruh Komisaris Perempuan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan: Studi pada Perusahaan Energi di BEI (2022–2024)".

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris perempuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan?
3. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan?
4. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengangkat beberapa tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh komisaris perempuan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.
2. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.
3. Menguji pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.
4. Menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi terhadap Kebijakan

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan internal perusahaan serta evaluasi regulasi terkait tata kelola dan pelaporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan yang memperkuat struktur tata kelola, khususnya peran dewan komisaris dan komite audit, guna mendorong peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan energi. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mengevaluasi efektivitas ketentuan mengenai tata kelola perusahaan dan kewajiban pelaporan keberlanjutan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi manajemen, dewan komisaris, dan komite audit dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengungkapan keberlanjutan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat koordinasi dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat transparan, andal, dan relevan bagi pemangku kepentingan.